



Pengelolaan Malioboro Penuhi Tiga Unsur

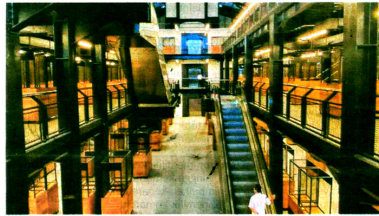
YOGYA, TRIBUN - Pengelolaan Malioboro, satu di antaranya penataan pedagang kaki lima atau PKL, mendapat dukungan dari sejumlah akademisi dan pakar.

Satu di antaranya datang dari akademisi UII Yogyakarta, Hangga Fathana. Menurut Dosen Program Studi Hubungan Internasional ini, dilihat dari

kebijaksanaan ekonomi, politik dan hubungan internasional, pengelolaan Malioboro oleh Pemda DIY dan Pemkot Yogyakarta seiring dengan Bank Dunia dalam membangun masyarakat inklusif.

Dalam konteks Malioboro, setidaknya ada tiga unsur dalam membangun masyarakat inklusif yakni adanya pasar (*market*), ruangan (*space*), dan layanan (*service*).

Di sini, Dosen Program Studi Hubungan Internasional ini melihat,



BARU - Bangunan baru yang direncanakan ditempati para PKL Malioboro mulai hari ini.

pengelolaan Malioboro telah memenuhi tiga unsur tersebut dan itu merupakan pengelolaan jangka menengah dan panjang.

"Pengelolaan Malioboro sudah memenuhi tiga unsur tersebut. Mari

• ke halaman 11

Pengelolaan

• Sambungan Hal 1

kita lihat satu per satu. Mulai dari pasar. Di Malioboro, aktivitas ekonomi tetap ada. Artinya, meski kemudian ini akan menjadi Sumbu Filosofi warisan dunia, cagar budaya, tapi aktivitas ekonominya ada. Tidak meminggirkan pedagang," paparnya, Selasa (25/1).

Selanjutnya adalah ruang atau *space*. Ditegaskan Hangga Fathana, semua pelaku di Malioboro tetap diberi ruang untuk beraktivitas.

Pedagang kaki lima atau PKL misalnya, tetap diberi ruang, sekalipun memang menjadi terpadu atau dalam satu lokasi khusus.

"Namun substansinya jelas, yakni memberi ruang bagi pelaku di Malioboro untuk tetap bisa mengakses ekonomi," ungkapnya.

Kemudian terakhir adalah layanan. Secara nyata pengelolaan Malioboro oleh Pemda DIY dan Pemkot Yogya bukan berhenti di penataan PKL, namun berupaya mendatangkan pengunjung dan tentu mendorong agar dagangan PKL menjadi laku.

"Pengelolaan Malioboro telah memperhatikan ketiga indikator, tinggal bagaimana eksekusinya. Malioboro ini milik semua masyarakat, untuk itu mari kita kawal bersama-sama implementasi dari pengelolannya. Kebijakan pemerintah harus mempertimbangkan semua pemangku kepentingan," tandasnya.

Ada manfaat

Dukungan pengelolaan Malioboro juga datang dari Revianto Budi Santosa, Dosen Arsitektur UII Yogyakarta. Dia berbicara tentang harapan-harapan Malioboro ke depan.

Dijelaskan akademisi yang akrab disapa Revi ini, Malioboro merupakan tumpuan banyak pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Sehingga banyak pihak yang mengharapkan sesuatu dari Malioboro.

"Mulai dari Sumbu Filosofi, kemudian wisatawan nyaman *selfie* sampai mereka yang berdagang mencari rezeki. Mereka mengharapkan yang terbaik dari Malioboro," ungkapnya.

Harapan terbaik itu menurut Revi adalah Malioboro mampu memberi manfaat

seluas-luasnya. Apalagi, penataan Malioboro ini sudah berlangsung lama.

Dia mencontohkan penataan parkir, penambahan elemen-elemen yang membuat pengunjung senang dan lainnya.

"Jadi Malioboro itu berkembang berangsur dan sejak lama. Jadi, karena ini meriyangkut banyak kepentingan maka perencanaan dan realisasi dari penataan harus ada kemanafaatannya," papar Revi.

Kedua adalah, pengelolaan harus adaptif atau ada penyesuaian dengan kondisi. Misalnya, selama ini kita meyakini wisata bakal *booming*, namun tiba-tiba dihantam pandemi Covid-19.

"Terakhir adalah bersifat komunikatif. Semua orang yang berkepentingan harus diajak komunikasi," pintanya.

Revi menyimpulkan, ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam penataan dan pengelolaan Malioboro yakni memiliki kemanfaatan yang luas, adaptif dan komunikatif.

Jadi, dukungan dari semua pihak mampu menciptakan iklim yang baik dalam mendukung ekonomi pedagang dan masyarakat yang lebih baik. (rbt)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kebudayaan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya			
3. Kundha Kabudayan			

Yogyakarta, 04 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005